

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

- Abdussalam, H.R. & Sitompul, D.P.M. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Restu Agung, 2007.
- Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Merapah Jejak Polisi Kehutanan: Kesatria Penjaga Rimba Raya Indonesia*. Jakarta: KLHK dan IPKI, 2022.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Husein, H.M. *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Manan, Bagir. *Perkembangan Hukum Lingkungan dan Tantangan Penegakan di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nur, Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Redi, Ahmad. *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Ronald Tilson & Ulysses S. Seal. *Tigers of the World: The Biology, Biogeography, Management, and Conservation of the Genus Panthera tigris*. Park Ridge, NJ: Noyes Publications, 1987.
- Sodikin. *Penegakan Hukum Lingkungan: Tinjauan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997*. Jakarta: Djambatan, 2007.
- Soekanto, Soerjono & Mamudi, Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Widiarty, Wiwik Sri. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

## b. Jurnal

- Alfiananda, R.F. (2019). “Masyarakat Hukum Adat dalam Skema Kebijakan Kriminal di Bidang Perusakan Hutan”. <https://doi.org/10.33061/1.JWH.2018.24.2.2719>
- Basuki. *Paradoks Tindakan Hukum Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* [Disertasi Doktorat, Universitas Jayabaya], 2020. <https://repo.jayabaya.ac.id/1454/1/disertasi%20pak%20bas.pf>
- Erbabley, A.N. *Fungsi Koordinasi Penyidik Polisi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembalakan Liar* [Disertasi Doktorat, Universitas Tadulako], 2013. <https://www.neliti.com/publications/145093>
- Angrayni, L. (2024). “Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kehutanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.” *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 8, No. 1. UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Arum Zaharani, Latifah, M., Zaryanti, R., Fajrina, S., & Razak, A. (2024). “Kajian Perilaku Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*).” *Journal BIOnatural*, Vol. 11, No. 2. <https://ejournal.stkipbbm.ac.id/index.php/bio>
- Dadan Rahmat. (2020). “The Effectiveness of Law Enforcement on Illegal Logging Based on the Value of Justice.Unifikasi.” Vol. 7, No.1. <https://doi.org/10.25134/UNIFIKASI.V7I1.2715>
- Diah Purnomo. (2024). “Revisi UU Konservasi: Langkah Progresif Menghadapi Kejahatan Lingkungan”. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 15, No.2.
- Difa, H. (2023). “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Dilindungi di Sumatera Utara.Rechtsnormen Komunikasi dan Informasi Hukum, Vol. 2, No. 1. <https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v2i1.295>
- Fadil, A.M. & Firman, C.A. (2022). “Penegakan Hukum terhadap Penjualan Hewan yang Dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.” *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 2, No. 1.
- Firdaus, F. (2013). “Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Struktur Pemerintahan Daerah.” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 1. <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/163>

- Harkrisnowo, H. (2020). "*Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*," Vol. 1, No. 1.
- Mainuru, M.Z.L., Rehatta, V.J.B., & Daties, D.R.A. (2024). "*Perlindungan Harimau Sumatera Menurut Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora (CITES) 1963*." TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 11. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i11.2100>
- Manao, H. & Eddy, T. (2013). "*Kajian Yuridis atas Penangkapan dan Penahanan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Hukum Acara Pidana di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor: 15/Pra.Pid/2012/PN.Mdn dan Putusan Nomor: 01/Pid.Pra/Per/2012/PN.Stb)*." Jurnal Mercatoria, Vol. 6, No. 2. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/639>
- Panawar, O.M. (2021). "*Pengaturan Internasional tentang Pencegahan Perdagangan Hewan dan Tumbuhan Terancam Punah (CITES) dan Kaitannya dengan Perlindungan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Indonesia*." Lex et Societatis, Vol. 9, No. 1. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/32049>
- Raynaldo Sembiring & Wenni Adzkia. (2021). "*Memberantas Kejahatan Atas Satwa Liar: Refleksi atas Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990*." Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 2, No.2. <https://doi.org/10.38011/jhli.v2i2.25>
- Rizki, Z. (2020). "*Optimalisasi Penelusuran Aset dalam Penegakan Hukum Pembalakan Liar oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*." Padjadjaran Law Review, Vol. 8, No.1. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/download/30/102>
- Widiarti, W., Sari, P.K., Djusfi, A.R., & Trisna, N. (2021). "*Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi di Wilayah Hukum Kabupaten Bener Meriah*." Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol. 5, No. 1. <http://jurnal.utu.ac.id/jcivile/article/view/3535>

### c. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa.

Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri LHK Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. Jakarta: KLHK.

Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan. Jakarta: KLHK.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri 29 Tahun 2011 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, Dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

**d. Lainnya**

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. *Laporan Tahunan Direktorat Penegakan Hukum KLHK 2023*. Jakarta: KLHK, 2023.